

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Diera global yang semakin maju saat ini, ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dan setiap tahunnya ekonomi dapat tumbuh dan berkembang. Dalam perkembangannya perekonomian mengalami tranformasi modernisasi, bahkan inovasi dalam pengaplikasian penerapannya. Karena perubahannya, perekonomian menjadi bahan pembicaraan setiap tahunnya baik itu oleh ilmuwan, pejabat, ekonom ataupun masyarakat yang tertarik sebagai pengamat ekonomi. Berbagai media baik itu sosial media atau berita televisi maupun koran sering memuat berita mengenai pembangunan ekonomi, inflasi, pengangguran, kesempatan kerja atau tenaga kerja, hasil produksi dan penanaman modal.

Terdapat penggolongan kelompok yang membedakan suatu negara didunia ini yaitu kelompok negara maju dan kelompok negara yang sedang berkembang. Negara maju adalah negara yang telah mengalami perubahan dengan ditandai pendapatan perkapita dan mayoritas penduduk di negara maju mempunyai kemampuan baca tulis yang tinggi. Negara maju tersebut sadar akan pentingnya suatu pendidikan. Negara berkembang kebalikan dari negara maju, yaitu seperti halnya proses permbangunan yang belum memcapai target yang diinginkan atau belum dapat meningkatkan pendapatannya, dan Indonesia termasuk didalamnya.

Keadaan negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya diwarnai oleh ciri-ciri sebagai berikut: tingkat kehidupan yang rendah, tingkat pengangguran yang meluas, tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, tingkat penduduk yang tinggi, ketergantungan produk pertanian dan ketergantungan terhadap negara-negara maju.

Suatu perekonomian yang terjadi dinegara maju maupun negara berkembang bukan jaminan negara tersebut menjadi makmur apabila tidak diikuti dengan dengan perluasan kesempatan kerja yang setiap tahun ketahun memasuki dunia kerja. Terbatasnya permintaan kerja menjadi masalah utama suatu negara seiring dengan berubahnya makro ekonomi dinegara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat, faktor-faktor eksternal seperti memburuknya kondisi neraca pembayaran, meningkatnya masalah utang yang mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan industri, tingkat upah dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Masalah pertumbuhan ekonomi sangat erat dengan pengangguran jika kondisi perekonomian baik maka otomatis penyerapan tenaga kerja juga akan baik. pengangguran merupakan masalah utama yang sering dihadapi oleh setiap negara baik itu negara maju atau negara berkembang khususnya seperti indonesia. Pengangguran memang menjadi persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian diindonesia, setiap tahun jumlah penduduk diindonesia selalu meningkat akibatnya jumlah angkatan kerja pun menjadi semakin besar. Dalam sensus penduduk tahun 2001 mendefinisikan pengangguran adalah suatu

keadaan seseorang yang tergolong angkatan kerja umur (15-64 tahun) (BPS, 2001).

Tingginya tingkat pengangguran berdampak negatif terhadap suatu negara. Berkaitannya dengan pendapatan yang menyebabkan seseorang yang menganggur harus mengurangi pengeluarannya. Kekacauan politik dan sosial menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat, selain itu tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak sebanding dalam penyerapan tenaga kerja. Penganggur bukan juga dari orang yang tidak mencari pekerjaan, penganggur yang disebabkan pemutusan hubungan kerja juga dapat terjadi karena perusahaan mengurangi jumlah tenaganya yang keamanannya kurang kondusif atau akibat krisis ekonomi.

Pandangan Islam terhadap pengangguran sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah Ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Artinya: “Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah, ayat 105).

Sebagaimana ayat di atas yang ditafsirkan M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa sebaik-baiknya manusia dalam melakukan suatu pekerjaan hendaknya

karena Allah SWT, dengan amal yang shaleh dan bermanfaat, baik pada diri sendiri namun juga terhadap orang lain atau masyarakat umum.

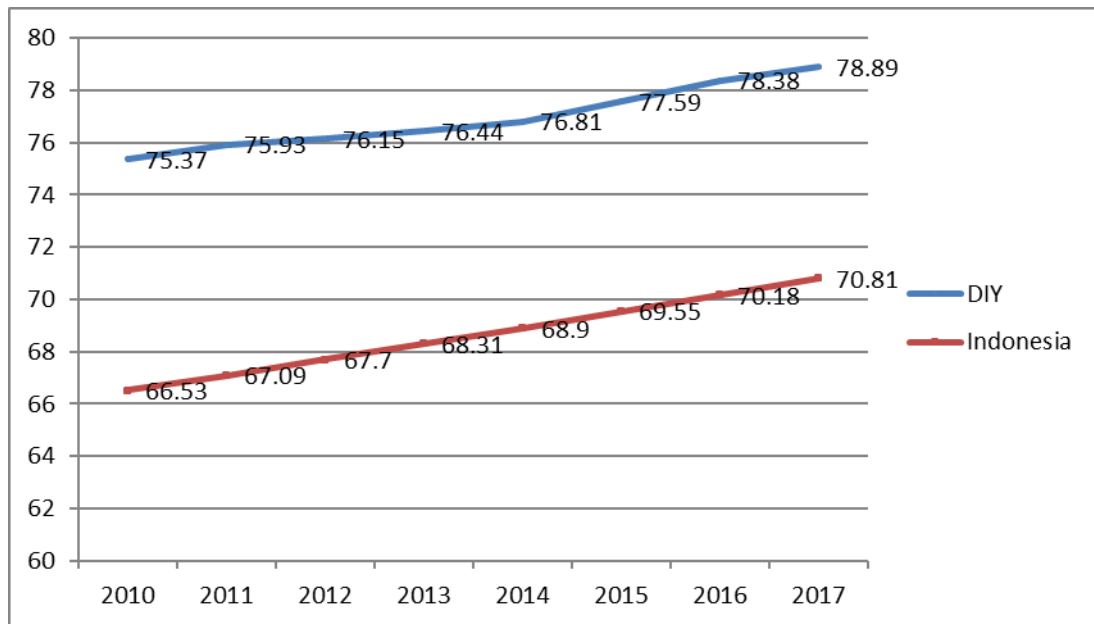
Sebelum menuju permasalahan pengangguran ini, peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, diantaranya Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Indeks Pembangunan Manusia dan terdapat penelitian sebelumnya yang meneliti tentang hubungan antara Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran antara lain penelitian oleh Sisnita (2017), Zulaili (2017), Firdhania dan Muslihatiningsih (2017) unruk Variabel jumlah penduduk dan upah minimum diteliti oleh Khairunisa (2017), Kuntiarti (2017), variabel Pendapatan Asli Daerah dilakukan oleh Suwandika dan Yasa (2015), Adriani dan Yasa (2015).

Perbedaan peneliti ini dengan penelitian sebelumnya adanya penambahan Pendapatan Asli Daerah didalam tingkat pengangguran diantara nya Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia. perbedaan lainnya yaitu tahun penelitian dari 2010-2017 serta wilayah/objek penelitian yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Istilah pembangunan di Indonesia sudah sejak lama menjadi terminologi sehari-hari. Pembangunan ekonomi secara filosofis suatu proses pembangunan yang dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk

menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Kembauw, Sinay, & Sahusilawane, 2017). Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tengah-selatan pulau Jawa yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi, laju pertumbuhan meningkat sejak tahun 2003-2007 dan mengalami kenaikan pertahun sebesar 1,1%. Pada hakikatnya pembangunan merupakan perubahan yang berjalan secara bertahap untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih baik atau serba modern, baik secara material maupun spiritual dan harus dipandang sebagai proses multidimensional dari perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat serta institusi-institusi nasional dan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan dalam pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.

Pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami kemajuan selama periode 2010-2017 yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I.Yogyakarta. IPM merupakan poin penting untuk mengukur suatu keberhasilan dalam membangun kualitas hidup penduduk/masyarakat, dengan melihat kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang diantaranya adalah pengangguran, kemiskinan, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi.



Sumber : BPS DIY, 2017

### Gambar 1.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) D.I. Yogyakarta dan Indonesia, 2010-2017

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa IPM di DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya, begitu pun di Indonesia. pembangunan manusia D.I.Yogyakarta terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2017. IPM D.I.Yogyakarta meningkat dari 75,37 pada tahun 2010 menjadi 78,89 pada tahun 2017. IPM D.I. Yogyakarta rata-rata tumbuh sebesar 0,65 persen per tahun dan levelnya tetap pada posisi “tinggi” mulai tahun 2010. Pada tahun 2017, IPM D.I. Yogyakarta telah mencapai 78,89, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. IPM di DIY juga lebih tinggi dibanding IPM Indonesia yang sebesar 70,81. Angka IPM tersebut meningkat sebesar 0,51 poin atau tumbuh sebesar 0,65 persen dibandingkan IPM tahun 2016 yang sebesar 78,38 (BPS, DIY).

Indikator lain yang juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran yaitu Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Menurut Mankiw (2000) upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, sehingga besar kecilnya upah yang ditetapkan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang ada. Sehingga dapat diartikan bahwa jumlah tenaga kerja yang diserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap angkatan kerja yang ada. Jika upah yang ditetapkan tinggi maka biaya produksi juga akan meningkat dan akan berakhir dengan perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja dan berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran (Alghofari, 2010).

Dalam islam upah diartikan sebagai imbalan yang diterima dari seseorang setelah melakukan pekerjaan baik itu imbalan didunia yang berupa uang atau barang, maupun dalam diakhirat berupa pahala yang dilakukan secara adil dan layak. Dikatakan adil ketika seseorang melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menimbulkan kecurangan sedangkan istilah layak apabila perusahaan memberikan upah sesuai dengan pekerjaan dan standar minimum yang ditentukan. Sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan para pekerja dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian penduduk yang menganggur akan semakin berkurang setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran pemerintah dengan program-programnya yang ingin menyejahterakan rakyat. Adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pula. Disinilah peran otonomi daerah, sebagai organisasi yang dapat

memberdayakan potensi daerah masing-masing baik secara kualitas dan kuantitas para angkatan kerja, maupun peningkatan pengetahuan dan keterampilan para angkatan kerja, serta adanya penyempurnaan teknologi dalam proses produksi, dan adanya kesadaran masyarakat untuk menabung.

PAD yang tinggi merupakan tujuan dari semua pemerintah daerah. PAD yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik. PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pengelolaan potensi-potensi produktif suatu daerah oleh pemerintah daerah dengan bantuan masyarakat setempat dan pihak swasta. Setiap daerah memiliki sumber PAD berbeda-beda sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Semakin tingginya PAD suatu daerah dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang dihasilkan atau diperoleh disetiap daerah dari sumber-sumber yang terdapat dalam daerah itu sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undang daerah. Melalui sektor pendapatan daerah dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Penentuan pajak terhadap PAD ditentukan sendiri oleh daerah yang bersangkutan, namun masih selaras dengan ketentuan Undang-Undang. PAD ditentukan dari obyek pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan



pertumbuhan ekonomi dapat meningkat apabila PAD meningkat dan kesejahteraan masyarakat daerah meningkat.

Dalam upaya memaksimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dapat membiayai pengeluaran publik melalui penerimaan daerahnya. Sehingga pengeluaran pemerintah suatu daerah sangat bergantung pada penerimaan daerahnya, yang salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan daerah yang sah lainnya. Untuk mengetahui perkembangan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tiap provinsi yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
Perkembangan Pendapatan Daerah DIY Tahun 2014 – 2017  
(Dalam Persen)

APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2014-2015	13,15%
2015-2016	8,20%
2016-2017	0,84%

Sumber: Pemda DIY

Tabel 1.1 diatas merupakan data perkembangan pendapatan asli daerah di D.I.Yogyakarta. berdasarkan data diatas perkembangan pendapatan asli daerah di D.I.Yogyakarta pada tahun 2014-2015 yaitu sebanyak 13,15% dan pada tahun 2015-2016 mengalami perkembangan sebesar 8,20% dan perkembangan PAD pada tahun 2016-2017 meningkat hanya 0,84%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2017 mengalami perkembangan tetapi menurun setiap tahunnya.

Indikator selanjutnya yang berpengaruh dalam tingkat pengangguran terbuka adalah jumlah penduduk yang dimana secara umum penduduk adalah seseorang yang menunjukkan total manusia yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah di suatu negara dan yang menempati suatu wilayah tertentu dalam waktu yang lama atau jangka panjang.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah penduduk di kabupaten/kota provinsi D.I. Yogyakarta pada Tahun 2013-2017**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kulonprogo	403.179	407.709	412.198	416.683	421.295
Bantul	947.072	959.445	971.511	983.527	995.264
Gunungkidul	700.191	707.794	715.282	722.479	729.364
Sleman	1.141.733	1.154.501	1.167.481	1.180.479	1.193.512
KotaYogtakarta	402.679	407.667	412.704	416.683	422.732
jumlah	3.594.854	3.637.116	3.679.176	3.719.851	3.762.167

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2 diatas merupakan data jumlah penduduk kabupaten/kota yang ada di provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2013-2017. Berdasarkan data diatas, pada tahun 2013 jumlah penduduk kabupaten/kota yang ada di provinsi D.I. Yogyakarta di kabupaten yaitu sebanyak 3.594.854 jiwa dan ditahun 2017 sebanyak 3.762.167 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk pada setiap tahunnya pada empat kabupaten dan satu kota di Provinsi D.I. Yogyakarta

Pada tahun 2010, usia produktif pada sektor tenaga kerja dan angkatan kerja sebesar 71,41 %. Diantaranya disektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor pertanian kemudian disusul sektor-sektor jasa lainnya.

Sektor jasa meliputi sektor pariwisata, sektor industri, sektor perdagangan dan sektor industri kecil atau sektor kerajinan tangan.

Menurut Azizah (2016) dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga ikut meningkat. Angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan dan umumnya ada di negara berkembang yang laju pertumbuhan penduduk yang didalamnya terdapat angkatan kerja lebih besar daripada laju pertumbuhan lapangan kerja. Oleh karena itu tidak semua angkatan kerja bisa mendapatkan pekerjaan ada juga yang menganggur teori ini menekankan akan pentingnya pertumbuhan baru yang berperan di dalam pemerintah.

Kaum klasik berpendapat bahwa semakin banyak jumlah penduduk suatu negara akan berakibat pada penurunan jumlah pendapatan nasional, dan akan berdampak secara tidak langsung pada pengangguran. Kenaikan jumlah penduduk suatu negara akan menyebabkan lonjakan angkatan kerja dan tingkat pengangguran menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang harus diikutsertakan dalam proses pembangunan karena banyaknya angkatan kerja dan pengangguran adalah bagian dari pergerakan proses ekonomi.

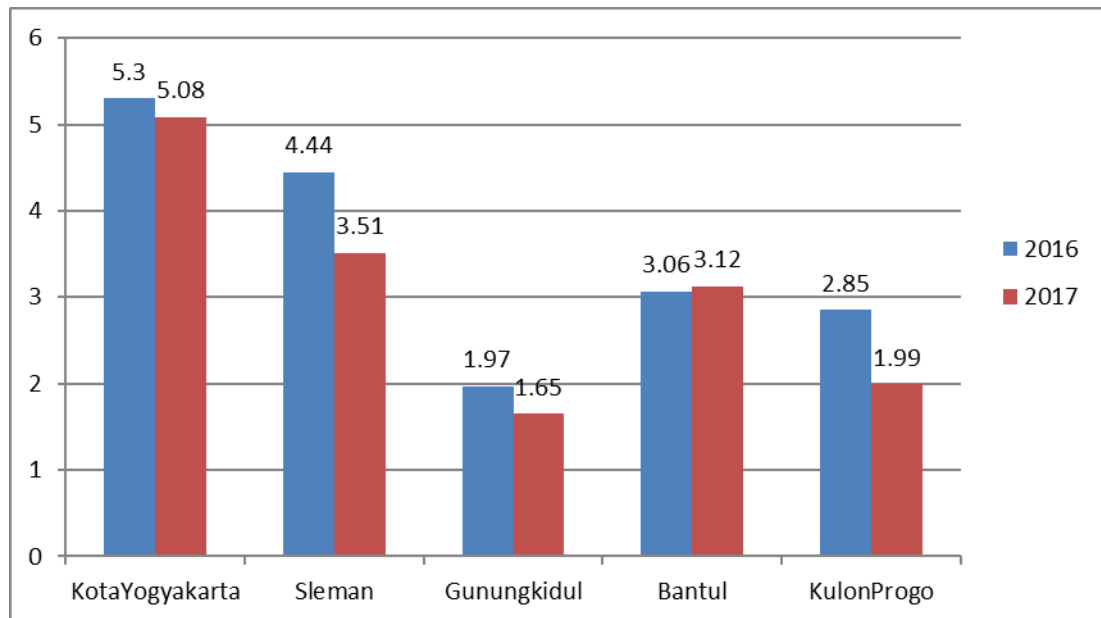
Pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan yaitu membuka kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan secara maksimal untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat agar angkatan kerja bisa terserap dalam kegiatan ekonomi disetiap wilayah. Apabila pada penciptaannya tidak diiringi dengan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Pengangguran di DIY

menjadi problematika yang cukup serius karena pengangguran di DIY menyangkut sebagian tenaga-tenaga profesional ditingkat pendidikan tinggi atau disebut dengan kota pelajar, yang menciptakan bibit-bibit tenaga kerja pada lulusan Sarjana Strata 1 maupun Magister 2.

Permasalahannya tentang pengangguran dari tahun ke tahun yang mereka hadapi semakin lama semakin bertambah serius dan lebih rumit. Pembangunan yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat dikarenakan banyaknya jumlah angkatan kerja yang melebihi dari jumlah lapangan pekerjaan yang telah disediakan yang tidak terserapnya secara mneyeluruh disetiap wlayah yang mengakibatkan pengangguran semakin meningkat. Bertambah tinggi nya jumalh pengangguran,semakin tinggi juga proporsi keseluruhan tenaga kerja. Dampak pengangguran dapat berpengaruh negatif untuk suatu negara karena dapat menyebabkan kemiskinan semakin tinggi, kriminalitas terjadi dimana-mana, dan dapat memacu banyaknya orang untuk menjadi pengemis atau anak jalanan yang sanagat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan suatu negara yang permasalahan inisangat penting untuk dikaji (Sisnita, 2017).

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menyatakan bahwa tingkat pengangguran diindonesia pada february 2016 mencapai 5,5% ata 7.02 juta orang. Di Indonesia angka tersebut termasuk negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi tetapi jika dibandingkan dengan pada tahun 2015, tingkat pengangguran pada tahun 2016 mengalami penurunan sebelumnya

mencapai 6,18% atau 7,56 juta orang. Berikut Jumlah tingkat Pengangguran yang terjadi pada tahun 2016-2017 dikabupaten/kota di DIY



Sumber : Badan Pusat Statistik DIY, 2017

### Gsmbar 1.2

Jumlah Tingkat Pengangguran di Kabupaten/kota Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2016-2017

Grafik 1.2 diatas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di 4 kabupaten dan 1 kota yang ada Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami penurunan kecuali di kabupaten bantul pada tahun 2017 meningkat 0,6 persen, penurunan paling drastis yaitu pada kabupaten Sleman dan Kulonprogo yaitu mencapai 0,93 dan 0,86. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pengangguran dikabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami penurunan, namun penurunannya masih sangat sedikit.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DIY menempati posisi ke tiga

terendah di Indonesia jika dibanding dengan daerah lainnya. Tercatat pada tahun 2016 periode februari sebesar 2,81 persen sementara posisi pertama dengan TPT terendah yaitu Provinsi Bali sebesar 2,12 persen disusul posisi kedua yaitu provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,72 persen. dan pada tahun 2017 dan 2018 Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan, di tahun 2017 peningkatan TPT sebesar 0,4 persen dan di tahun 2018 sebesar 0,22.

Dari latarbelakang diatas bahwa tingkat pengangguran yang rendah akan sangat penting untuk mensejahterakan suatu masyarakat dan mencegah penurunan pendapatan nasional. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan maksud mengetahui faktor-faktor variabel bebas terhadap tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi D.I. Yogyakarta sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam mengatasi tingkat pengangguran.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan dari Latarbelakang uraian permasalahan diatas, maka fokus permasalahan yang akan dianalisis dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah menjelaskan bahwa penelitian ini hanya berfokus pada Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode tahun 2010-2017.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperoleh beberapa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah maupun Dinas-Dinas seperti Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan penelitian sebagai acuan dan rekomendasi untuk mengambil kebijakan serta mengatasi masalah tingkat pengangguran sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi yang perlu diperhatikan untuk mengentas pengangguran.
2. Bagi dunia praktis diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang positif untuk meningkatkan pengetahuan. dan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian ini dan yang topiknya yang berkaitan dengan penelitian untuk dijadikan sebagai referensi.
3. Bsgi Masyarakat Umum diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tentang keadaan tingkat pengangguran di kota/kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta